

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustin, Yutanti, 2008, *Sanksi Pidana Perpajakan dan Penegakan Hukumnya*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ali, Mahrus dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan – Sistem Pemindaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali, Mahrus, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- David C. Korten, alih bahasa oleh Agus Maulana, 1997, *When Coporations Rule The World*, Professional Books, Jakarta.
- Diaz Priantara, 2013, *Perpajakan Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya* Salemba Empat, Jakarta.
- Lestari, Endang Sri, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Tesis S2 UGM, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*. Cetakan keenam, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.

- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudjarwadi, Djangkung, 2004, *Tindak Pidana Perpajakan*, disampaikan dalam Lokakarya Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Perundang-undangan

- Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diumumkan dalam LNRI Tahun 2008 Nomor 211.
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana diumumkan dalam LNRI Tahun 2021 Nomor 6736
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diumumkan dalam LNRI Tahun 2001 Nomor 4150
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diumumkan dalam LNRI Tahun 2021 Nomor 2120
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diumumkan dalam LNRI Tahun 2007 Nomor 4756

Tim Pengkajian Hukum BPHN, 2003, *Pengkajian Hukum tentang Asas-Asas Pidana Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Masa Kini dan Mendatang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Rumanang, Herbert, 2014, *Tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. NO. 2239 K/PID.SUS/2012)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Internet

<https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-sepanjang-2020-penerimaan-pajak-minus-197>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021.

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisis-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021.

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/190000669/pajak-arti-sejarah-dan-fungsinya?page=all>, diakses pada tanggal 6 Mei 2021.